

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arka, I Wayan, 2016, *Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Universitas Dwijendra bekerja sama dengan Udayana University Press, Denpasar.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M.dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Radja Grafindo, Jakarta.
- HS, Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum-Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kohar, Abdul, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pide, A Suriyaman Masturi, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pitlo, A, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta.
- Poesoko, Herowati, M. Khoidin, dan Dominikus Rato, 2015, *Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Peraturan*, Cetakan ke-81, Djambatan, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rido, R. Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan Koperasi Yayasan Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar.

- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1989, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus bekerja sama dengan “Bali Shanti”, Budaya Bali LPPM Unud, dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, Denpasar.
- Sudiyat, Iman, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan Kesebelas, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suratman dan H Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Surpha, I Wayan, 1992, *Eksistensi Desa Adat di Bali dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Upada Sastra, Denpasar.
- Suwitra, I Made, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Pertama, LoGoz Publishing, Bandung.

- Taneko, Soleman B., 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Cetakan Pertama, PT Eresco, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung.
- Utrecht, E., 1957, *Pengantar dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta,
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widrajaya, I. G. Rai, 2003, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Windia, Wayan P., 2014, *Hukum Adat Bali: Aneka Kasus dan Cara Penyelesaiannya*, Udayana Press, Denpasar.
- Windia, Wayan P., dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Swasta Nulus bekerja sama dengan "Bali Shanti", Budaya Bali LPPM Unud, dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, Denpasar.

B. Makalah/Jurnal/Artikel/ Laporan Penelitian

- Sudantra, I Ketut, 1999, "Forum Komunikasi Antar Desa Adat dalam Kontek Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum yang Dihadapi Desa Adat", *Kertha Patrika* No. 72 Th. XXIV, Fakultas Hukum Universitas Udayanan, Denpasar.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Adat, "Kedudukan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya UU No 22 Tahun 1999 di Kabupaten Gianyar", *Laporan Penelitian*, Kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Gianyar dan Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Problematik Pemberian Strata Jenis Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali, *Makalah Seminar*, yang diseleggarakan di Bali pada tanggal 18 Juni 2004.

Hendriatiningsih, "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)", *Jurnal Sosioteknologi*, Bali, Edisi 15 tanggal 7 Desember 2008.

I Ketut Sudantra, "Pensertifikatan Tanah Adat di Bali: mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Tanah Adat, Hukum Adat, dan Organisasi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, 25 Juli 2018.

Wayan P. Windia, 2017, "Memahami Karakteristik Tanah Desa di Bali", *Makalah*, Pokok-pokok pikiran yang disajikan sebagai pengantar dalam diskusi terfokus (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, pada tanggal 30 Agustus 2017, bertempat di Gedung Nayaka Loka, Kebun Raya Bedugul.

Wayan P. Windia, "Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Adat, dan Hukum Adat Bali Masa Lalu dan Masa Kini", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Tanah Adat, Hukum Adat, dan Organisasi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, 25 Juli 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555).

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah tanggal 23 Oktober 2017.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2016, Nomor 568).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986 tentang Penunjukkan Pura Sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29).